

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Brotohardjo, R Santosa, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.

_____. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

Mardiasmo, 2005, *Perpajakan (edisi revisi)*, Andi Offset, Yogyakarta.

_____. 2006, *Perpajakan, Ed. XIV*, Andi Offset, Yogyakarta.

_____. 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi Offset, Yogyakarta.

_____. 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi Offset, Yogyakarta.

_____. 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Andi Offset, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan AKta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.

Ruslan, Rosady, 2004, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Santoso, Urip, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

_____. 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Predana Media, Jakarta.

Siahaan, Marihot Pahala, 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparno, 2012, *Hukum Pajak: Suatu Seketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Makalah/Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Nasution, Aulia Perdana H., 2016, “Perlindungan PPAT Terhadap Perbedaan Penetapan Validasi Pajak Jual Beli Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nisya, Intifada Atin, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, *Hukum Bisnis*, Universitas Narotama Surabaya, Volume 3 Nomor 1, April 2019, hlm 90.
- Prayoga, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 02-Juni 2016, hlm 194.
- Saputra, Johan, 2018, “Perlindungan Hukum Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Pajak Dibayarkan Dinyatakan Tidak Wajar Dalam Proses Validasi”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm 219.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916).

Peraturan Menteri Keuangan No 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-26/PJ/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No SE-28/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan/Atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Ahmad Ridwan Rais, Selaku staf Notaris/PPAT di Kabupaten Bantul, pada tanggal 29 April 2021 pukul 18.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Aji Budiwijoyo, Selaku staf Notaris/PPAT di Kabupaten Bantul, pada tanggal 1 April 2021 pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Iin Suny Atmadja, Selaku Notaris/PPAT Kabupaten Bantul, pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ikhwan Catur Rahmawan, Selaku Pegawai Kantor Pajak Pratama, pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Jenya Erika, Selaku Pegawai KPP, pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Lian Ridho Pamungkas, Selaku Pegawai Kantor Pajak Pratama, pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Mustika Rahaju, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Bantul, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Mustofa, selaku Dosen Akta Tanah Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Servatia Herlina, Selaku Notaris/PPAT Kabupaten Bantul, pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Wiratmoko, Selaku Pegawai Kantor Pajak Pratama, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.

E. Internet

Asas Pemungutan Pajak, diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak> pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.30 WIB.

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia oleh Muhammad Idris, 12 Juni 2021, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2021/06/12/175505326/asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia?page=all>, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 19.00 WIB.

Macam-Macam Pajak di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui oleh Rani Maulida, pada 18 Agustus 2018, diakses melalui <https://www.online-pajak.com/macam-macam-pajak> pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

Mengenai 4 Prinsip Pajak yang Wajib Dipungut di Indonesia oleh Ageng Prabandaru, 4 september 2018, diakses melalui <https://klikpajak.id/blog/4-prinsip-pajak-di-indonesia/> pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 19.00 WIB.

Objek PPh diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/objek-pph> pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

Penagihan, diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/penagihan> pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 pukul 09.00 WIB.

Penagihan Pajak: Penjelasan Lengkap yang Perlu Anda Tahu oleh Rani Maulida, 13 September 2018, diakses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/penagihan-pajak> pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 pukul 09.30 WIB.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, oleh Glosarium, diakses melalui <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kabupaten Samosir, oleh Ada Tua Simbolon, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/164942-ID-peranan-pejabat->

pembuat-akta-tanah-ppat.pdf pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 pukul 10.00 WIB.

Perlindungan Hukum, oleh Admin, Sudut Hukum, diakses melalui <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB.

Perpajakan, oleh First Tania P.J., Catarina Manurung, 2 Februari 2021, diakses melalui <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/prinsip-prinsip-perpajakan/> pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

Selayang Pandang Sejarah Keadilan Pajak Dan Penerapannya, 7 Januari 2020, oleh Admin BDK Denpasar, diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-selayang-pandang-sejarah-keadilan-pajak-dan-penerapannya-2020-01-07-0bfb8cbd/> pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

Tax Learning, oleh Nasikhudin S.A.P., 22 Agustus 2016, diakses melalui <https://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=152&q=&hlm=8>, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 pukul 14.01 WIB.

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak, oleh Dina Lathifa, diakses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/menilik-timbul-dan-hapusnya-utang-pajak-di-indonesia> pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

Waspadalah Para Notaris/PPAT Dalam Melakukan Pembayaran Pajak, oleh Irma Devita, diakses melalui <https://irmadevita.com/2011/waspada-dalam-melakukan-pembayaran-pajak/>, pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.